

Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pada BAPPEDA Aceh Barat Daya

Penyusunan dan
Pelaksanaan
Anggaran

Munawarah

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia
E-Mail: munawarah12ips@gmail.com

Cici Darmayanti

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

211

ABSTRACT

A budget is a written plan that describes the estimated income and expenditure planned by an individual, organization, or government entity within a certain period of time. This research aims to determine the preparation and implementation of the budget at the Regional Development Planning Agency of Southwest Aceh Regency. This is useful for the development of the Southwest Aceh region in identifying the effectiveness of the budget preparation and implementation process by BAPPEDA to support regional development planning. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The subject of this research is the finance section of Development Planning Agency at Sub-National Level (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA) Aceh Barat Daya. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Primary data in this research comes from observations made by researchers and direct interviews with several heads of fields, namely the Head of Reports and Programs, the Head of P2EP3 and the Head of PPKAPM. The results of the research show that the preparation of the budget at BAPPEDA Aceh Barat Daya has been carried out very well and the implementation of the BAPPEDA Aceh Barat Daya budget for the 2022 Fiscal Year has been efficient.

Submitted:
4 OCTOBER 2023

Accepted:
17 DECEMBER 2023

Keywords: Preparation, Implementation, Budget, Government

ABSTRAK

Anggaran adalah suatu rencana tertulis yang menggambarkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh suatu individu, organisasi, atau entitas pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini berguna untuk pengembangan wilayah Aceh Barat Daya dalam mengidentifikasi efektivitas proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah bagian keuangan BAPPEDA Aceh Barat Daya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara langsung dengan beberapa kepala bidang yaitu Kabid laporan dan program, Kabid P2EP3 dan Kabid PPKAPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada BAPPEDA Aceh Barat Daya sudah dilakukan dengan sangat baik dan pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 sudah efisien.

Kata kunci: Penyusunan, Pelaksanaan, Anggaran, Pemerintah

JIMKES

Jurnal Ilmiah Manajemen
Kesatuan
Vol. 12 No. 1, 2024
pp.
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7860
E-ISSN 2721 – 169X
DOI: 10.37641/jimkes.v12i1.2409

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan lembaga perencanaan yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di wilayah Aceh Barat Daya. Bappeda menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat daftar urutan prioritas kegiatan dalam pembangunan di Aceh Barat Daya baik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari sumber pembiayaan lainnya (Budhi & Jamaluddin, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintah daerah (Priatama, 2020). Anggaran merupakan perencanaan keuangan tahunan yang berisi estimasi pendapatan dan belanja suatu instansi pemerintahan (Sarah, 2022). Penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik sangat penting untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang (Adiwijaya, 2022). Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan (Rampengan et al., 2016). Anggaran yang baik dan efisien akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan (Palar et al., 2017).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peranan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk penganggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Andrias et al., 2022). Provinsi Aceh, memiliki berbagai program dan proyek pembangunan yang dituangkan dalam anggaran daerah. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pembangunan yang signifikan adalah Aceh Barat Daya (Nurlina et al., 2023). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok dalam perencanaan dan pembangunan, memiliki tanggung jawab penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai leading sector perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dituntut untuk dapat menyusun anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya masih menghadapi beberapa kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Sponem & Lambert (2016) menyatakan bahwa sering terjadinya perbedaan antara anggaran dan realisasi anggaran, selain itu tingkat evaluasi perencanaan anggaran yang dilakukan masih lemah sehingga terjadinya program-program kegiatan yang direncanakan tidak tepat dengan sasaran.

Penyusunan anggaran bertujuan untuk merencanakan alokasi dana untuk kegiatan dan program pemerintah dalam satu tahun anggaran (Siregar & Ritonga, 2019). Anggaran disusun berdasarkan skala prioritas, ketersediaan dana, dan kebijakan pemerintah. Anggaran bertujuan untuk menjamin ketersediaan pendanaan, mendorong efisiensi dan efektivitas program, serta mewujudkan akuntabilitas dan disiplin keuangan negara (Rampengan et al., 2016). Dengan anggaran yang baik, pemerintah dapat merealisasikan kebijakan dan mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Selain penyusunan anggaran, Pelaksanaan anggaran oleh BAPPEDA merupakan tahapan vital dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (Hutagalung et al., 2023). Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *Standard Operational Procedures* (SOP) yang berlaku. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berjalan efektif dan tepat waktu sesuai perencanaan semula. Pengawasan dan evaluasi menyeluruh diperlukan pada setiap tahap pelaksanaan anggaran agar pencapaian target kinerja, keluaran, maupun hasil dapat dimaksimalkan (Murei et al., 2017). Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik juga tetap terjamin. Penelitian yang dilakukan Rampengan et al.

(2016) menyatakan bahwa BAPPEDA kota Manado kurang efektif dalam penyusunan anggaran karena ada beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tapi tidak terlaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2021) pada BAPPEDA kota Asahan menyatakan bahwa tahun 2016-2019 sudah efektif dan efisien karena penghematan anggaran mencapai angka 81,59%. Berdasarkan penelitian Priatama (2020) menyatakan bahwa penyusunan anggaran BAPPEDA kabupaten Gunungkidul sudah efektif karena sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini berguna untuk pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengidentifikasi efektivitas proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran oleh BAPPEDA guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BAPPEDA terkait pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Dampak positif yang diharapkan adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi BAPPEDA dalam proses penganggaran, optimalisasi *value for money* anggaran BAPPEDA, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran merupakan perencanaan operasional keuangan tahunan pemerintah yang berisi estimasi pendapatan dan belanja negara/daerah (Rafita et al., 2021). Anggaran adalah suatu rencana tertulis yang menggambarkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh suatu individu, organisasi, atau entitas pemerintah dalam jangka waktu tertentu (Anam et al., 2018). Anggaran disusun berdasarkan skala prioritas program dan ketersediaan dana untuk merealisasikan kebijakan publik (Sarah, 2022). Penyusunan anggaran dilakukan dengan berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Anggaran yang telah disahkan kemudian dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan anggaran diawasi secara ketat dan dievaluasi melalui laporan realisasi anggaran (Palar et al., 2017). Dengan anggaran yang akuntabel dan terkendali, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat (Pazalina, 2015).

Anggaran memiliki beberapa fungsi, pertama fungsi perencanaan, yaitu anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti dan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam unit dan uang. Kedua fungsi pengendalian, yaitu adanya anggaran memaksa para manajer untuk mengoordinasikan rencana dan aktivitas. Ketiga fungsi pengawasan, yaitu anggaran harus dapat dijadikan alat bantu manajemen dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sekaligus mengendalikan operasi. Keempat fungsi komunikasi, yaitu anggaran dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasi yang efisien. Semua anggota perlu mengetahui mengenai tujuan, kebijakan, program, dan kinerja. Terakhir fungsi evaluasi, yaitu ketika anggaran sedang dirumuskan, sektor publik menganalisis rencana untuk masa depan dan menyerahkan perkiraan sesuai kebutuhan (Handayani, 2019).

Anggaran sektor publik merujuk pada anggaran yang disusun dan digunakan oleh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Siregar & Ritonga, 2019). Anggaran sektor publik bersifat nirlaba dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan publik serta pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rampengan et al., 2016). Anggaran sektor publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang setiap tahunnya, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tingkat daerah, pemerintah daerah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sektor publik harus disusun dan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip

transparansi, akuntabilitas, value for money, keadilan, dan disiplin anggaran (Handayani, 2019).

Proses penyusunan anggaran sektor publik dimulai dengan tahap persiapan, di mana strategi dan perencanaan strategis dirumuskan untuk menetapkan tujuan dan arah bagi setiap bagian organisasi dalam periode tertentu. Langkah kedua melibatkan penyusunan anggaran dengan menetapkan alokasi dana untuk berbagai program dan aktivitas dalam bentuk satuan moneter. Selanjutnya, anggaran yang disusun akan disetujui pada tahap persetujuan oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari proses penyusunan. Tahap pelaksanaan anggaran memerlukan implementasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terakhir, evaluasi anggaran dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Korompot & Poputra, 2015).

Realisasi anggaran sektor publik adalah hasil aktual dari pelaksanaan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah atau entitas sektor publik (Sumenge, 2019). Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana rencana anggaran yang telah diajukan dan disahkan telah diimplementasikan dalam praktiknya (Basri, 2013). Realisasi anggaran sektor publik mencakup berbagai aspek, termasuk pendapatan dan pengeluaran, serta sejauh mana tujuan dan program-program yang telah direncanakan telah tercapai. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Anggraini et al., 2023).

Penelitian Korompot & Poputra (2015) menyatakan bahwa DPPKAD kota Kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Selanjutnya, Rizkina (2018) menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran di BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tingkat efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2016 menunjukkan 90,16% yang artinya sudah sangat baik dalam penghematan anggaran belanja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna secara signifikan yang dapat mempengaruhi substansi penelitian (Sugiyono, 2012). Tempat dilakukannya penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Barat Daya. Subjek pada penelitian ini adalah bagian keuangan BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal dari observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara langsung dengan beberapa kepala bidang yaitu Kabid laporan dan program, Kabid P2EP3 dan Kabid PPKAPM. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi BAPPEDA Aceh Barat Daya dan LAKIP 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada tiga kabid di Bappeda Aceh Barat Daya, yaitu Kabid laporan dan program, Kabid P2EP3, dan Kabid PPKAPM. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber mencakup berbagai aspek

terkait penyusunan anggaran di instansi tersebut. Narasumber diminta untuk menjelaskan apa yang harus dilengkapi dalam menyusun anggaran di Bappeda Aceh Barat Daya serta acuan apa yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran. Selain itu, mereka juga diminta untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara lebih mendalam dalam proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses tersebut. Selanjutnya, narasumber diminta untuk memberikan penilaian mengenai seberapa efektifnya penyusunan anggaran di Bappeda Aceh Barat Daya serta upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.

Penyusunan anggaran merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk merencanakan pendapatan, biaya, dan aktivitasnya dalam satu periode ke depan (Kamau et al., 2017). Proses penyusunan anggaran biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Berdasarkan wawancara dengan Kabid laporan dan program mengenai hal apa saja yang harus dilengkapi dalam menyusun anggaran pada Bappeda Aceh Barat Daya, Kabid laporan dan program menyatakan:

“Sebelum penyusunan anggaran di BAPPEDA kita perlu melihat hasil evaluasi anggaran perencanaan atau kegiatan tahun yang lalu, untuk mengetahui kira kira ditahun yang lalu apa yang belum tercapai yang menjadi target didalam rencana BAPPEDA sehingga bisa dicapai ditahun berikutnya. Misalnya ada beberapa dokumen yang belum tercapai dan itu akan diteruskan ditahun berikutnya, sehingga rencana tersebut bisa dicapai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipaparkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran di BAPPEDA, terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi sasaran atau target dalam rencana BAPPEDA yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Dengan demikian, rencana dan sasaran yang belum terpenuhi tersebut dapat dimasukkan kembali dalam anggaran tahun berikutnya agar bisa dicapai. Sebagai contoh, misalkan dalam rencana BAPPEDA tahun 2022 terdapat target penyusunan 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tetapi pada implementasinya di tahun 2022, baru 2 dokumen yang selesai disusun. Maka untuk anggaran BAPPEDA tahun 2023, target penyusunan 1 dokumen perencanaan yang tertunda tersebut dimasukkan kembali. Dengan melakukan evaluasi seperti ini, diharapkan seluruh target dan rencana program pembangunan daerah yang telah dicanangkan BAPPEDA dapat terlaksana dari tahun ke tahun. Walaupun ada target yang tidak terpenuhi di suatu tahun, target tersebut tetap dianggarkan di tahun berikutnya sehingga rencana pembangunan daerah secara keseluruhan dapat tercapai. Selain itu, dalam penyusunan anggaran BAPPEDA Aceh Barat Daya memiliki beberapa acuan, seperti hasil wawancara berikut ini:

“Hal yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran adalah data. Data tersebut menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Kemudian kebutuhan, seperti kebutuhan akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa BAPPEDA ini tidak berjalan seperti yang sudah direncanakan, karna ada intruksi baru dari pusat sehingga hal tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan penganggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beberapa hal yang menjadi acuan utama dalam proses penyusunan anggaran di BAPPEDA yaitu: pertama data menjadi acuan pertama dan utama. Data yang dimaksud bisa berupa data capaian kinerja tahun lalu, data kebutuhan nyata masyarakat dan daerah, data evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, dan data-data pendukung perencanaan lainnya. Data ini penting guna memastikan anggaran yang disusun selaras dengan kondisi riil daerah. Kedua kebutuhan. Selain data, kebutuhan nyata akan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan juga menjadi acuan penyusunan anggaran BAPPEDA. Anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primair guna menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Ketiga instruksi dari pemerintah pusat. Meskipun BAPPEDA telah memiliki rencana kerja dan anggaran awal, namun terkadang ada instruksi baru dari kementerian

atau dinas terkait di pemerintah pusat yang harus diakomodasi. Instruksi baru ini bisa berupa program prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga hal itu juga perlu menjadi acuan dalam penyusunan ulang anggaran.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses penyusunan anggaran BAPPEDA bersifat dinamis dan berpedoman pada kondisi terkini, bukan hanya berdasarkan rencana semata. Penyusunan anggaran memiliki beberapa faktor penghambat seperti yang diungkapkan narasumber:

“Sebenarnya di BAPPEDA sendiri ini tidak ada faktor penghambat dalam penyusunan anggaran, cuman ada beberapa kendala yang dihadapi BAPPEDA seperti kekurangan sumber daya manusia baik dari jumlah kualitas maupun kuantitasnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada dasarnya proses penyusunan anggaran di BAPPEDA sendiri tidak menemui hambatan atau masalah yang berarti. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan sumber daya manusia. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) ini mencakup dua hal, yaitu kuantitas dan kualitas SDM penyusun anggaran (Atmaja et al., 2023). Dari sisi kuantitas, jumlah pegawai di bagian yang menangani anggaran BAPPEDA dirasakan masih kurang dan perlu ditambah. Beban kerja penyusunan anggaran yang cukup tinggi sedangkan jumlah pegawai terbatas menyebabkan proses pengerjaan menjadi kurang maksimal. Sementara dari sisi kualitas, kompetensi dan kemampuan pegawai dalam menyusun anggaran perlu terus ditingkatkan. Misalnya saja dengan pelatihan teknis terkait regulasi anggaran terbaru, peningkatan skill analisis dan evaluasi program, serta pelatihan aplikasi anggaran. Peningkatan kapasitas ini penting agar kualitas anggaran yang dihasilkan semakin baik.

Penyusunan anggaran yang efektif sangat penting dilakukan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Rafita et al., 2021). Anggaran yang cermat dan akurat akan mengarahkan pengalokasian dana sesuai prioritas dan membantu analisis kinerja lembaga. Dengan demikian, risiko penyimpangan berkurang dan tujuan lembaga lebih mudah tercapai. Berdasarkan hasil wawancara narasumber menyatakan bahwa:

“Penyusunan anggaran di BAPPEDA sudah sangat efektif, karna penyusunan anggaran di BAPPEDA ini kita berkoordinasi dengan seluruh bidang karna kita punya jadwal dan sasaran output apa yang harus dicapai.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di BAPPEDA dinilai sangat efektif karena beberapa faktor. Pertama, terdapat koordinasi yang baik antara berbagai bagian atau bidang di BAPPEDA terkait dengan penyusunan anggaran, menandakan partisipasi menyeluruh dari seluruh unit dalam proses tersebut. Kedua, penyusunan anggaran dilakukan dengan mengikuti jadwal dan sasaran yang jelas, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan pencapaian target sesuai waktu yang ditentukan. Ketiga, output atau hasil yang diharapkan dari proses penyusunan anggaran telah ditetapkan secara jelas, memungkinkan adanya fokus dalam menentukan kinerja pada setiap tahapan kegiatan penyusunan anggaran (Maher et al., 2018).

Dengan demikian, penyusunan anggaran di BAPPEDA telah dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terukur. Proses penganggarannya pun sistematis serta fokus pada pencapaian hasil. Inilah wujud dari penyusunan anggaran yang efektif. Akan tetapi jika terjadi masalah dalam penyusunan anggaran, pihak BAPPEDA Aceh Barat Daya akan melakukan evaluasi, seperti yang diungkapkan narasumber:

“Upaya yang dilakukan jika terjadi permasalahan, kita sifatnya selalu berkoordinasi baik pada level koordinasi tingkat antar kbid, kita juga bekoordinasi dengan kepala BAPPEDA dan kita juga akan melakukan koordinasi dengan angkatan yang lebih tinggi yaitu sekda dan bapak bupati.”

Dalam hasil wawancara ini, terungkap bahwa tim atau unit memiliki sistem koordinasi internal yang baik, melibatkan koordinasi antar kbid. Mereka juga

berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), serta memiliki strategi untuk melibatkan tingkatan yang lebih tinggi, seperti Sekretaris Daerah (SEKDA) dan Bupati, dalam menangani permasalahan.

Pencapaian indikator keberhasilan program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang memadai (Sumada, 2021). Pelaksanaan operasional program dan kegiatan memerlukan dukungan pembiayaan yang cukup. Sumber pembiayaan program dan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan program dan mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan (Mulyono et al., 2021).

Table 1. Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.997.662.511	3.839.140.006	96,03%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	582.392.681	498.700.159	85,63%
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah	634.600.919	582.418.109	91,78%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan	64.204.325	62.706.825	97,67%
	Total	5.278.860.436	4.982.965.099	94,39%

Source: LAKIP Tahun 2022 Aceh Barat Daya

Penyerapan belanja pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.982.965.099,- atau 94.39% dari total anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp.5.278.860.436,-. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan (Suharyono, 2019). Rata-rata Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja Bappeda tahun 2022 sebesar 92 % ke atas dari anggaran yang telah disediakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAPPEDA Aceh Barat Daya terkait dengan proses penyusunan APBD beserta dengan pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPEDA Aceh Barat Daya secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 juga sudah efisien dengan persentase pencapaian pada tahun 2022 sebesar 94,39% yang dapat dikatakan baik sekali. Dengan demikian, diharapkan adanya Evaluasi Rutin Agar proses anggaran tetap terjaga efisiensinya, disarankan untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses penyusunan anggaran. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan serta memastikan konsistensi dengan regulasi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anam, B. S., Aliamin, A., & Zahara, E. (2018). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Migas Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. *Kolegial*, 6(2), 160–168.
- [2] Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- [3] Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Poliban Press.
- [4] Hayati, I. T. (2021). Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Asahan. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- [5] Korompot, R., & Poputra, A. T. (2015). Analysis of Budgeting for Earning, Financial and Local Asset Management Department of Kotamobagu City Budget Year 2014. *Jurnal EMBA*, 3(1), 841–848.
- [6] Palar, D., Ventje Ilat, & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado. *Jurnal Risiko*, 5(2), 1935–1943.

- [7] Pazalina Panjaitan, A. N. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- [8] Priatama, C. B. (2020). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, 1–19.
- [9] Rafita, R., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal of Islamic*.
- [10] Rampengan, M., Nangoi, G. B., & Manossoh, H. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 616–623.
- [11] Rizkina, B. (2018). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- [12] Sarah. (2022). Efektivitas Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Analisis Manajemen Keuangan Syariah). *Institut Agama Islam Negeri Iain Parepare*, 8. (5).2017, 2003–2005.
- [13] Siregar, K. H., & Ritonga, N. (2019). Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan.
- [14] Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- [15] Sumenge, A. S. (2019). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*,
- [16] Sponem, S., & Lambert, C. (2016). Exploring differences in budget characteristics, roles and satisfaction: A configurational approach. *Management Accounting Research*, 30, 47-61.
- [17] Budhi, S., & Jamaluddin, J. (2022). Optimization of The Agency of Regional Planning, Development, Research and Development (Bappeda) In Participatory Planning Through Development Planning Consultations (Musrebang) In North Barito Regency. *International Journal Political, Law, and Social Science*, 3(1).
- [18] Adiwijaya, A. (2022). Effectiveness of the Implementation of Education Budget Arrangements in the APBN/APBD Based on the 1945 Constitution Article 31 paragraph (4) and Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System Article 49 paragraph (1) related to the Covid 19 Pandemic. In Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia.
- [19] Andrias, M. Y., Aituru, Y. P., Sari, L., & Manullang, S. O. (2022). Juridical Analysis of Central and Regional Government Development Implementation Given Law Number 25 Of 2004 Concerning the National Development Planning System. *Legal Brief*, 11(5), 3299-3309.
- [20] Nurlina, N., Andiny, P., & Muda, I. (2023). Development Strategy for Disadvantaged Regions Based on Leading Sectors in the Eastern Aceh Region. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(4), 25.
- [21] Hutagalung, M. A., Nurbaiti, N., Lubis, A. W., Nurlaila, N., & Inayah, N. (2023). The Influence of Budget Planning and Budget Implementation on The Level of Budget Absorption. *International Journal of Economics Social and Technology*, 2(4), 248-259.
- [22] Murei, L., Kidombo, H., & Gakuu, C. (2017). Influence of Monitoring and Evaluation Budget on Performance of Horticulture Projects in Nakuru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(12), 620-633.
- [23] Anggraini, B., Tripermata, L., & Meiriasari, V. (2023). The Effectiveness and Efficiency of Budget Realization Performance Based on Incremental Budgeting in Lebung Gajah Village, Palembang. *International Journal of Community Service & Engagement*, 4(2), 54-61.
- [24] Kamau, J. K., Rotich, G., & Anyango, W. (2017). Effect of budgeting process on budget performance of state corporations in Kenya: A case of Kenyatta National Hospital. *International Academic Journal of Human Resource and Business Administration*, 2(3), 255-281.
- [25] Atmaja, D. S., Zaroni, A. N., & Yusuf, M. (2023). Actualization of Performance Management Models for The Development of Human Resources Quality, Economic Potential, And Financial Governance Policy in Indonesia Ministry of Education. *Multicultural Education*, 9(01), 1-15.
- [26] Maher, M. H., Fakhar, M. S., & Karimi, Z. (2018). The relationship between budget emphasis, budget planning models and performance. *Health Management & Information Science*, 5(1), 16-20.
- [27] Sumada, I. M. (2021). Influence Planning and Budgeting Activities on Organizational Performance at Denpasar Bali City Government Bureau. *The Social Perspective Journal*, 1(1), 33-47.
- [28] Mulyono, J., Warsono, H., Puryono, S., & Astuti, R. S. (2021). Implementation of Village Funds Distribution: A Paradox or The Regional Government's Regulation of Central Java Province. *European journal of economics and management sciences*, (4), 53-62.
- [29] Suharyono, S. (2019). The effect of accountability, transparency, and supervision on budget performance by using the concept of value for money in regional business enterprises (bumd) of Riau province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236-249.